Analisis Implementasi Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark Kabupaten Sukabumi 2019 Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal Di Geopark Ciletuh – Palabuhanratu

Lailatul Aulia 1), Abdul Syahid Muqsitul Fajar 2)R Deden Sunmendar Rachmat 3) Fitri Rahmafitria 4) *Magister Pariwisata, Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia 1,2,3,4)*

*Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kota Bandung, Jawa Barat 40154*

[*ayalaila@upi.edu*](mailto:ayalaila@upi.edu)[*abdulsyahid123@upi.edu*](mailto:abdulsyahid123@upi.edu)[*dedensunmendar@upi.edu*](mailto:dedensunmendar@upi.edu)[*fitrirahmafitria@upi.edu*](mailto:fitrirahmafitria@upi.edu)

**Abstrak**

Geopark atau taman bumi adalah suatu wilayah yang memiliki warisan geologi yang didukung oleh keragaman geologi, keragaman hayati dan keragaman budaya didalamnya. Pengembangan kawasan geopark haruslah menjunjung tiga pilar utama yaitu konservasi, edukasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pengembangan geopark adalah melalui geowisata dimana kekayaan geologi yang ada dikembangkan menjadi potensi pariwisata. Selain berfokus pada aspek konservasi dan edukasi, pengembangan geowisata sendiri tentu tidak luput dari keterlibatan masyarakat lokal sebagai penggerak pariwisata di dalamnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi penting dalam peningkatan kualitas SDM pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatat itu sendiri. Agar pengembangan dan pemberdayaan ini memiliki tolak ukur yang jelas, kemudian disusunlah Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark Kabupaten Sukabumi di tahun 2019 yang lalu. Salah satu kebijakan yang tertulis adalah mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat di Kawasan Geopark Ciletuh yang harus pro-poor, pro-growth, pro-jon dan pro-environment. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian metode deskriptif kualitiatif dengan instrumen wawancara dan studi literatur untuk menjelaskan serta menafsirkan apakah pedoman pemberdayaan masyarakat yang tertuang di dalam masterplan ini berhasil dijalankan. Adapun temuan dari penelitian menyebutkan bahwa meskipun beberapa strategi seperti pendampingan dan pelatihan berhasil diupayakan, namun faktor-faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, literasi, kecakapan teknologi, pandemi, anggaran dan kebijakan pemerintah tetap menjadi kendala yang terus dihadapi oleh pengelola Geopark Ciletuh dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Dibutuhkan pendekatan komunikatif dan waktu yang panjang agar kemudian pemberdayaan masyarakat ini dapat tercapai seutuhnya.

**Keyword : Geopark, Geowisata, Masterplan pengembangan wilayah Geopark, Pemberdayaan Masyarakat**

***Analysis of the Implementation of the 2019 Sukabumi Regency Geopark Area Development Master Plan for Empowering Local Communities in the Ciletuh Geopark – Palabuhanratu***

***Abstract***

*Geopark is an area that is supported by the geodiversity, biodiversity and cultural diversity in it. The development of the geopark area must uphold three main pillars, namely conservation, education and improving the welfare of the its community. One form of geopark development is through geotourism where existing geological wealth is developed into tourism potential. The development of geotourism itself certainly cannot be separated from the involvement of the local community as a driving force for tourism in it. Therefore, community empowerment is important in improving the quality of human resources and improving the welfare of the community itself. In order for this development and empowerment to have clear benchmarks, a Master Plan for the Development of the Sukabumi Regency Geopark Area was prepared in 2019. One of the written benchmark is to established pro-poor, pro-growth, pro-job and pro-environment community in Ciletuh Geopark – Palabuhanratu. In this study the authors will use a qualitative descriptive research method with interview instruments and literature studies to explain and interpret whether the community empowerment guidelines contained in this master plan have been successfully implemented. The findings from the research state that although several strategies such as mentoring and training have been successfully pursued, factors such as poverty, education level, literacy, technological skills, pandemic and government policies remain obstacles faced by Ciletuh Geopark managers in community empowerment efforts. A communicative approach and a long time are needed so that community empowerment can be fully achieve.*

***Kata kunci: Geopark, geotourism, Geopark regional development master plan, Community Empowerment***

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara khatulistiwa dengan pesona bentang alam yang indah. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik membuat Indonesia memiliki tampak geologi yang tentu beragam pula. Wilayah dengan kenampakan geologi yang unik ini dapat disebut dengan geopark atau taman bumi. Menurut Undang-Undang sebagaimana tertera dalam Perpres No. 9 pasal 1 tahun 2019, geopark atau taman bumi dapat diartikan sebagai sebuah wilayah geografi tunggal maupun gabungan yang memiliki warisan geologi (geosite) dengan bentang alam yang bernilai atau disebut dengan warisan geologi (geoheritage). Dimana terdapat keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), serta keragaman budaya (cultural diversity) di dalamnya. Adapun pengelolaan geopark ini hendaknya dikelola untuk kepentingan konservasi, edukasi, serta pembangunan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat dalam mengoptimalkan potensi yang ada di kawasan geopark tanpa harus merusak kekayaan alam didalamnya.

Banyak potensi pariwisata yang kemudiaan dapat dikembangkan dari keindahan alam serta budaya yang ada di Indonesia. Salah satu potensi pengembangan yang sesuai dengan keragaman geologi Indonesia adalah dengan adanya pengembangan taman bumi atau geopark sebagai destinasi wisata (geowisata). Pengembangan geopark menjadi geowisata dianggap ideal karena selain menyediakan destinasi untuk berwisata, program pengembangan geopark juga berlandaskan pada tiga pilar utama yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat (Perpres No. 9, 2019). Diharapkan melalui pengembangan sektor pariwisata geopark, nantinya akan tercipta pembangunan wilayah serta pariwisata berkelanjutan di masa depan.

Untuk mewujudkan pengembangan taman bumi atau geopark yang sesuai dengan kaidah dan tepat sasaran, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden no 9 tahun 2019. Secara garis besar Perpres ini berisikan aturan serta kaidah pengembangan geopark dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para stakeholders turut serta dalam upaya pengembangan taman bumi menurut wewenangnya masing-masing. Salah satu pasal yang mengatur pengembangan wilayah Geopark ini adalah pasal 8 dimana pemerintah daerah harus terlibat dalam penyusunan rencana induk (masterplan) sebagai pedoman pengembangan kawasan taman bumi sesuai dengan tiga pilar utamanya yaitu konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Sukabumi adalah salah satu daerah di Indonesia yang kemudian mengindahkan Perpres ini dengan mengeluarkan Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark Kabupaten Sukabumi di tahun 2019 yang disusun oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Kabupaten Sukabumi sendiri membawahi Kawasan UGG Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, dengan total area seluas 126.100 hektar meliputi 74 desa dan 8 kecamatan di dalamnya yaitu Kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Waluran, Ciemas, Ciracap dan Surade. Luasnya area yang dicakup oleh kawasan Geopark Ciletuh ini sama dengan 30% dari total wilayah Kabupaten Sukabumi. Dengan keragaman geologi dan budaya di setiap wilayahnya, tentu hal ini dapat dikembangkan menjadi potensi pariwisata geologi (geowisata). Konsep geowisata sendiri adalah salah satu perwujudan pengembangan kawasan geopark dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat selain tentunya fokus utama pengembangan yaitu edukasi dan pelaksanaan konservasi lingkungan.

Ada banyak potensi pariwisata yang terdapat di Kawasan Geopark Ciletuh. Mulai dari keindahan pantai, jalur trekking, gunung serta perbukitan yang indah, air terjun, curug, kampung adat, desa wisata dan masih banyak lainnya. Beberapa destinasi yang dapat dituju di Geopark Ciletuh Palabuhanratu diantaranya Pantai Palangpang, Pantai Ujung Genteng, Bukit Teletubbies, Curug Puncak Manik, Curug Cigangsa, Puncak Tugu, Puncak Darma, Desa Wista Hanjeli, dan lain sebagainya.

Selain potensi pariwisata yang didukung oleh keragaman geologi dan keragaman hayati yang ada di dalamnya, keberlangsungan Geopark Ciletuh tentu tidak dapat dijalankan tanpa peran dan partisipasi masyarakat lokal. Keragaman sosial dan budaya yang dimiliki masyarakat tentu juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang ada di Geopark Ciletuh. Oleh karena itu, melalui Masterplan Pengembangan Wilayah Geopark Kabupaten Sukabumi tahun 2019, pemerintah daerah tidak hanya mengatur kebijakan konservasi dan edukasi dalam pengembangan kawasan geopark dan geowisata saja, tetapi juga mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat lokal di dalamnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu tujuan dan proses (Suharto, 2005). Pemberdayaan merupakan suatu kondisi dimana terdapat proses dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian (Ma'arif et al., 2019). Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dihubungkan dengan konsep masyarakat atau individu yang mandiri dan partisipatif. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program atau sebagai suatu proses dimana terdapat tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya (Rachaju et al., 2022).

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan sektor pariwisata sendiri telah diterangkan di dalam beberapa kebijakan pemerintah yang ada sebelumnya. Sebelum dikeluarkannya Perpres No. 9 tahun 2019, Undang-undang No. 6 Pasal 112 ayat 4 tahun 2014 telah lebih dulu mengatur mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat desa harus dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Menurut (Setyadi et al., 2012), untuk mencapai pembangunan geopark yang ideal terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, akan diperlukan evaluasi secara berkala dan rutin serta penguatan aspek‐aspek pembangunan yang ada. Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, lokakarya dan seminar baik secara nasional dan internasional adalah salah satu cara yang dapat dilakukan. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di kawasan geopark mengenai ilmu perlindungan lingkungan dan warisan geologi juga menjadi salah satu langkah awal dalam upaya pemberdayaan dan menjaga keseimbangan tiga pilar utama pengembangan geopark yaitu edukasi, konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat ini juga diatur di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa harus ada penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri, Renja SKPD ini telah diimplemantasikan mengacu dari Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi menuju masyarakat mulia, produktif, dan sejahtera. Sayangnya hal ini belum bisa diwujudkan secara optimal karena angka kemiskinin yang cukup tinggi di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi (Rachaju et al., 2022). Dalam beberapa penelitian dijelaskan bahwa pembangunan pariwisata belum seluruhnya mampu mentaskan masalah kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat (Rahmafitria et al., 2019).

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada analisis implementasi pedoman pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertulis di dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark, Kabupaten Sukabumi tahun 2019. Menurut Samodra (2002) sebagaimana dikutip dalam masterplan pengembangan kawasan geopark Kabupaten Sukabumi tahun 2019, ada 4 pilar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan geopark, yaitu pro kemiskinan (pro-poor), pro pertumbuhan (pro-growth), pro kesempatan kerja (pro-job), dan pro lingkungan (pro-environment). Keempat pilar ini kemudian akan menjadi acuan bagi penulis tentang bagaimana optimalisasi serta strategi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan di kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu berikut kendala-kendala yang dihadapi.

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Tujuan Pembentukan Geopark**

Geopark merupakan perluasan gagasan untuk melestarikan sumber daya warisan geologi (*geoheritage*) secara efektif dan berkelanjutan. Perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pemikiran, keterbatasan dan peluang yang ada (Komoo, 2010). Beberapa hal yang mempengaruhi pengembangan ide geopark adalah:

1. Saat ini sebagian besar situs cagar budaya khusus berada di kawasan perkotaan dimana telah terjadi pembangunan dan kegiatan ekonomi di sekitar situs cagar budaya;
2. Konsep konservasi yang mengisolasi sumber daya pusaka untuk dilestarikan dan tidak dapat dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat setempat kurang mendapat perhatian dari para pelaksananya karena hal ini berarti sumber daya yang penting dibekukan dan bukannya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
3. Sumber daya cagar budaya dan kepentingannya masih kurang dipahami dan diapresiasi oleh masyarakat, oleh karena itu upaya pendidikan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam melestarikan sumber daya cagar budaya tersebut;
4. Terdapat peluang besar untuk memperkenalkan nilai dan keunikan sumberdaya warisan geologi sebagai bagian dari produk wisata alam baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat; Dan
5. Sebagian besar situs warisan geologi berada di daerah terpencil dan jauh dari kawasan pengembangan ekonomi. Pengembangan geopark di kawasan ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan sosial ekonomi mereka.

Konsep geopark dikembangkan berdasarkan gagasan tentang perlunya mengintegrasikan upaya pelestarian sumber daya cagar budaya dengan pengembangan sumber daya untuk meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Berdasarkan ide ini, geopark diatur UNESCOberfokus pada pengembangan peluang untuk memperkenalkan, melestarikan, dan meningkatkan kemampuan situs warisan geologis di panggung internasional. Geopark juga dapat digunakan sebagai alat pengembangan untuk memperkenalkan pentingnya hubungan antara manusia dan geologi, dan kemampuan situs warisan untuk menjadi fokus pembangunan ekonomi daerah. Konsep geopark memperkuat tuntutan tren saat ini untuk mengintegrasikan antara sains dan budaya, dengan tetap menghormati keunikan kehadiran lanskap fisik yang indah (UNESCO, 2000).

Berdasarkan keinginan yang ingin dicapai oleh gagasan geopark, (Komoo, Ibrahim, 2003) menjelaskan tiga peran utama geopark sebagai berikut:

1. Geopark sebagai kawasan pelestarian warisan geologi yang penting, jarang terlihat atau memperlihatkan keindahan alam. Peninggalan ini merepresentasikan sejarah terbentuknya Bumi di wilayah tersebut. Seperti lembaga konservasi lainnya, situs warisan geologis harus dilestarikan berdasarkan undang-undang yang ada, atau harus dibuat oleh negara yang belum memiliki undang-undang khusus;
2. Geopark adalah kawasan yang dapat dikembangkan untuk penelitian ilmiah dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, geopark dapat dijadikan sebagai laboratorium lapangan bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin memperdalam pengetahuan tentang berbagai ilmu yang berkaitan dengan lingkungan, ilmu kebumian dan pusaka; Dan
3. Sebagian besar situs warisan geologi dalam suatu geopark dapat dikembangkan sebagai produk wisata berbasis pengetahuan dan rekreasi. Dalam konteks ini, masyarakat lokal dapat diberi kesempatan untuk mengembangkan atau mengelola produk wisata tersebut untuk meningkatkan keterlibatan dan sosial ekonomi mereka.

Geopark adalah area geografis di mana situs warisan geologis menjadi bagian dari konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Geopark harus mempertimbangkan seluruh pengaturan geografis wilayah tersebut, dan tidak hanya mencakup situs-situs yang memiliki signifikansi geologis. Sinergi antara keanekaragaman hayati, keanekaragaman hayati, dan budaya, selain warisan berwujud dan tidak berwujud sedemikian rupa sehingga tema non-geologis harus disorot sebagai bagian integral dari setiap geopark, terutama ketika kepentingannya dalam kaitannya dengan bentang alam dan geologi dapat ditunjukkan. kepada para pengunjung. Untuk alasan ini, perlu juga memasukkan dan menyoroti situs nilai ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya dalam setiap geopark.

Dua komponen penting yang perlu dikembangkan dalam sebuah geopark, yaitu:

1. Berisi sejumlah situs warisan geologis yang penting secara regional atau internasional - sumber daya ini menjadi dasar pembentukan geopark;
2. Situs warisan budaya dan biologi, terutama yang memiliki hubungan erat dengan bentang alam dan geologi

Konsep geopark juga memberikan perhatian serius pada konsep pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang memperhatikan aspek preservasi atau konservasi, pendidikan masyarakat, dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Selain itu, keterkaitan antara komponen biologi, arkeologi, sejarah dan budaya dengan bentang alam dan geologi dapat dijadikan dasar untuk menghargai sumber daya alam secara terpadu guna menjaga kesehatan lingkungan dan kesejahteraannya. komunitas.

Pada prinsipnya, geopark memberikan penekanan pada pendekatan pengembangan kawasan yang terintegrasi dan holistik berdasarkan keberadaan sumberdaya warisan geologi yang bernilai tinggi. Ini memiliki tujuan menyatukan semua aspek warisan alam dan budaya yang saling terkait, dan bagaimana keanekaragaman geologis dapat mengikat semua komponen warisan lainnya. Bukan niat geopark untuk membuat seluruh kawasan dilestarikan. Di sisi lain, selain melestarikan situs geoheritage yang bernilai tinggi, geopark terkait dengan upaya mengundang individu (wisatawan) yang tertarik untuk mengenal warisan, terlibat dalam proses konservasi dan menghargai pentingnya nilai keragaman geologis untuk dibagikan (McKeever, 2009).

1. **Pembangunan Geopark Berkelanjutan**

Konsep geopark tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan situs-situs peninggalan geologis yang selama ini terabaikan atau terpinggirkan dari arus utama pelestarian warisan alam. Karena di sebagian besar negara berkembang, masih belum ada undang-undang khusus untuk melestarikan warisan geologis, sebagian besar warisan ini terperangkap dalam proses urbanisasi dan kegiatan pertanian. Separuhnya telah hancur akibat kegiatan pembangunan infrastruktur atau sedang menunggu untuk dihancurkan. Hanya sebagian kecil yang telah dilestarikan karena warisan geologis tersebut berada dalam kawasan konservasi keanekaragaman hayati atau warisan budaya lainnya. Beberapa di antaranya belum terjamah karena topografi wilayah yang berbukit atau bergunung sehingga sulit untuk dikembangkan.

Berdasarkan kendala di atas, konsep geopark sulit untuk dimajukan hanya berdasarkan pendekatan 'konservasi kawasan' seperti yang biasa dikembangkan dalam gagasan konservasi keanekaragaman hayati, seperti Taman Nasional atau kawasan lindung. Geopark diperkenalkan sebagai 'alat pembangunan' untuk mengembangkan suatu kawasan atau wilayah secara seimbang antara kebutuhan konservasi warisan, pemanfaatan sumber daya dan peningkatan status ekonomi penduduk setempat (UNESCO, 2000). Konsep geopark telah mendapat perhatian banyak negara karena konsep tersebut merupakan konsep pembangunan berbasis geoheritage tanpa mengabaikan kebutuhan untuk melestarikan sumber daya warisan budaya dan hayati, sekaligus mengembangkan suatu kawasan melalui kegiatan pariwisata (Komoo, Ibrahim, 2009). Berdasarkan pendekatan ini, kawasan pemukiman, kawasan pertanian dan industri, serta situs konservasi alam dan budaya berada di dalam geopark. Geopark yang komprehensif umumnya perlu dikembangkan berdasarkan Geopark Development Framework yang memuat tiga komponen utama yaitu konservasi warisan, pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kawasan UNESCO Global Geopark Ciletuh - Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi dalam rentang waktu satu bulan terhitung November 2022 hingga Desember 2022. Adapun metode penelitian yang penulis pilih adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Raco, 2010) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana peneliti melakukan penelusuran atau pendekatan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala sentral dari penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan metode pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penegasan serta penafsiran mengenai suatu fenomena atau gejala yang ditemukan di dalam penelitian secara lengkap (Bongdan et al., 1992).

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer, penulis menggunakan instrumen wawancara langsung dengan salah satu pengelola Geopark Ciletuh – Palabuharatu untuk mengetahui dan kemudian dapat menganalisis sejauh mana implementasi pedoman yang disusun dalam masterplan ini dapat diimplementasikan di dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Geopark Ciletuh. Penulis juga ingin mengetahui serta menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh pengelola khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Untuk data data sekunder dalam penelitian ini akan penulis dapatkan dari studi literatur dengan menelaah serta mencari informasi terkait mengenai penelitian ini dari jurnal serta studi yang telah dilakukan sebelumnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dibuatnya Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 yang lalu merupakan bentuk pelaksanaan Perpres No. 9 tahun 2019 dimana pada pasal 8 mengatur mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan taman bumi (geopark). Diharapkan dengan adanya masterplan ini kemudian dapat menjadi pedoman serta tolak ukur bagi Geopark Ciletuh - Palabuhanratu khususnya dalam proses konservasi, edukasi, dan juga dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang ada di kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu. Rancangan masterplan ini merupakan pedoman jangka panjang yang perwujudannya dihararapkan akan efektif di tahun 2030 sebagai jawaban atas tantangan-tantangan Sustainable Development Goals (SDG’s) selama 10 tahun kedepan.

Sebagai kawasan taman bumi, tentu saja kebijakan-kebijakan yang mengatur akan lebih diberatkan terhadap konservasi dan edukasi di lingkungan geopark itu sendiri. Terlebih lagi semenjak Geopark Ciletuh diresmikan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) site pada 17 April 2018, upaya konservasi dan edukasi pun semakin diperkuat. Namun seiring dengan diresmikannya Geopark Ciletuh – Palabuhanratu sebagai bagian dari UGG, antusias wisatawan untuk berkunjung pun menjadi lebih besar. Kawasan yang tadinya hanya didiami dan diisi oleh aktivitas harian warga lokal ini pun akhirnya menjadi bagian dari pariwisata (geowisata) dimana masyarakat pun dituntut agar dapat siap dalam menerima kunjungan dan aktivitas pariwisata yang muncul di daerah mereka.

Semenjak adanya aktivitas pariwisata di kawasan Geopark Ciletuh - Palabuhanratu, pelatihan dan pendampingan terus diberikan untuk masyarakat lokal agar mereka memiliki kesiapan dalam menghadapi aktivitas wisata serta memberikan celah bagi masyarakat agar kemudian dapat berdaya dan menjadi bagian dari pariwisata itu sendiri. Kawasan taman bumi yang hanya berfokus pada konservasi di tahun 2015-2016 ini, perlahan-lahan beradaptasi dengan aktivitas geowisata dengan menyediakan akomodasi seperti homestay dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk dapat bekerja sebagai pemandu wisata (guide) di kawasan geopark.

Pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Geopark Ciletuh adalah salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah digagas bahkan sebelum dikeluarkannya Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 yang lalu. Sebelum diresmikannya Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu sebagai bagian dari Unesco Global Geopark, dapat dirasakan kurangnya kerjasama antar masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kebijakan dari wilayah administratif Geopark Ciletuh. Hal ini dapat terlihat dari lambatnya pengembangan kawasan dan juga tidak adanya payung hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam operasional dan pengembangan kawasan taman bumi (Darsiharjo et al., 2016).

Barulah setelah dikeluarkannya Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019, pedoman serta tolak ukur pemberdayaan masyarakat ini pun dibuat semakin jelas sebagaimana pedoman dalam upaya konservasi dan edukasi di kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu.

Menurut Samodra (2002), dikutip dari masterplan pengembangan kawasan geopark Kabupaten Sukabumi tahun 2019, ada 4 pilar dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kawasan geopark, yaitu:

1. Pro Kemiskinan (pro-poor)

Pembangunan geopark harus berkontribusi terhadap upaya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya.

1. Pro pertumbuhan (pro-growth)

Pembangunan geopark harus berorientasi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi. Sehingga setiap stakeholders harus berpartisipasi untuk mewujudkan pertumbuhan sosial dan ekonomi ini

1. Pro kesempatan kerja (pro-job)

Pembangunan geopark harus menghasilkan peluang ekonomi baru khususnya di kawasan pedesaan. Salah satunya melalui geowisata dan sektor-sektor pendukung di dalamnya

1. Pro lingkungan (pro-environment)

Pembangunan geopark bertujuan untuk menggali keterkaitan antara komponen keragaman geologi, keanekagaraman hayati, dak keberagaman budaya untuk kepentingan pendidikan, konservasi dan pertimbuhan perekonomian lokal tanpa mengenyampingkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan.



Gambar 1. Konsep pembangunan dan peberdayaan masyarakat local

(Masterplan Pengembangan UNESCO Global Geopark Ciletuh – Palabuhanratu, 2019)

Setelah dikeluarkannya pedoman berupa masterplan pengembangan kawasan geopark, Badan Pengelola Geopark Ciletuh – Palabuhanratu pun telah melakukan beberapa strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal di Kawasan Ciletuh. Pelatihan soft skill dan hard skill terus diberikan kepada masyarakat untuk menunjang aktivitas geowisata yang terdapat di Ciletuh. Contohnya saja pelatihan pembuatan souvenir dan pelatihan marketing serta managerial bagi para pemandu wisata. Akan selalu ada regenerasi dan penyesuaian dalam pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Pelatihan-pelatihan ini sendiri difasilitasi oleh berbagai lembaga seperti Kementrian, Pemerintah Daerah dan Provinsi, Bappeda, Bappenas dan juga komunitas-komunitas yang berkompetensi di bidangnya. Badan pengelola UGG Ciletuh bertugas sebagai jembatan antara lembaga-lembaga ini agar kemudian dapat menyediakan pelatihan bagi masyarakat lokal. Semua kegiatan baik event maupun pelatihan yang hendak dilakukan di area geopark harus diketahui oleh badan pengelola karena dampak yang ditimbulkan akan dipertanggungjawabkan pada UNESCO melalui revalidasi berkala. Hal ini menjadi salah satu syarat agar Geopark Ciletuh-Palabuhanratu dapat tetap menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG).

Tidak hanya itu, terkait pengimplementasian pedoman yang tertuang di dalam masterplan pengembangan kawasan geopark, badan pengelola juga diharuskan memberikan laporan berkala kepada Pemda Sukabumi terkait perkembangan baik dari segi konservasi, edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Setyadi et al., 2012) yang mengatakan bahwa untuk mencapai pembangunan geopark yang ideal terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, akan diperlukan evaluasi secara berkala dan rutin serta penguatan aspek‐aspek pembangunan yang ada.

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya aktivitas geowisata di Geopark Ciletuh - Palabuhanratu membawa angin segar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat yang awalnya buta tentang pariwisata kemudian mulai beradaptasi karena terdampak dari aktivitas pariwisata. Selain didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah jauh lebih baik, kini sudah ada 200 lebih akomodasi homestay milik warga yang ada di kawasan Ciletuh. Selain itu, dengan adanya geowisata di Kawasan Ciletuh juga membuka lapangan kerja baru bagi para pemuda setempat, contohnya saja terbukanya lapangan kerja sebagai pemandu wisata, UMKM berupa kerajinan dan makanan, serta lai sebagainya. Hal ini tentu diiringi oleh pendampingan dan pelatihan berkala agar masyarakat dapat memberikan pelayanan prima kepada para pengunjung. Dapat kita lihat bahwa aspek pertumbuhan ekonomi, kesempatan bekerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat mulai dapat terpenuhi dengan hadirnya aktivitas geowisata dan pendampingan dalam hal pemberdayaan masyarakat ini.

Selain itu pemberdayaan perempuan dan isu kesetaraan gender juga menjadi fokus dari pemerintah daerah dan badan pengelola Geopark Ciletuh-Palabuhanratu. Banyaknya warga desa di kawasan geopark yang bekerja sebagai buruh migran dan kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi. Untuk itu, para mantan buruh migran yang kebanyakan adalah perempuan ini dibekali dengan pelatihan-pelatihan agar dapat memiliki penghasilan sendiri. Beberapa pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pembuatan sovenir dan kerajinan, pengelolaan pasca panen, pengolahan hanjeli sebagai alternatif pangan pokok, dan pendampingan di kampung-kampung nelayan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terutama kaum perempuan dapat mandiri secara finansial dan membangkitkan tumbuh gerak UMKM di Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu. Selain itu fokus pemberdayaan perempuan juga bisa dilihat dari dukungan badan pengelola serta pemerintah dalam memberdayakan pengajar atau guru perempuan yang merupakan masyarakat asli desa-desa di kawasan Geopark Ciletuh. Selain mengangkat isu kesetaraan gender, hal ini juga dimaksudkan agar para pengajar ini dapat meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Ciletuh menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sama halnya dengan yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia, pengembangan kawasan geopark dan pemberdayaan masyarakat Ciletuh sempat terhambat seiring adanya merebaknya wabah pandemi Covid 19. Larangan berkumpul dan berkerumun kemudian ikut membatasi gerak pengembangan kawsasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu pada saat itu. Namun badan pengelola dan generasi muda Ciletuh tetap berkontribusi dengan berdiskusi dan melakukan pelatihan secara online (daring) agar tetap dapat berbagi wawasan serta ide-ide baru dalam upaya pengembangan geopark. Adapun pelatihan yang didapat oleh para leader ini nantinya akan disampaikan dan dibagikan ke masyarakat lokal di Kawasan Geopark Ciletuh. Bahkan puncaknya, UGG Ciletuh berhasil menggagas Geopark Youth Forum (GYF). Ciletuh - Palabuhanratu UNESCO Global Geopark Youth Forum adalah wadah bagi para pemuda dalam menyuarakan aspirasi agar dapat terlibat lebih konkret, menjadi akor perubahan serta berkontribusi bagi kerangka strategis UNESCO Global Geopark untuk perlindungan warisan, mitigasi bahaya alam, perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun telah banyak diadakan pelatihan terkait pemberdayaan masyarakat, seta keberhasilan dalam menggagas Geopark Youth Forum (GYF) bukan berarti proses pengembangan dan pemberdayaan ini berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Geopark Ciletuh, ada beberapa kendala yang kemudian dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Pandemi Covid-19

Setelah dikeluarkannya masterplan pengembangan kawasan geopark Kabupaten Sukabumi di tahun 2019 yang lalu, Indonesia pun tidak dapat terhindar dari persebaran wabah Covid 19 di awal tahun 2020 seperti layaknya negara-negara lain di dunia. Hal ini tentu saja mempengaruhi upaya pengembangan yang tengah di lakukan di kawasan Geopark Ciletuh. Dari sisi pariwisata sendiri dapat dilihat dari jumlah kunjungan yang menurun drastis dikarenakan adanya kebijakan lockdown dan larangan bepergian dan berkerumun pada saat itu. Selain memicu pelemahan sektor ekonomi, kebijakan ini juga membuat proses pemberdayaan seperti pemberian pelatihan kepada masyarakat pun menjadi terhenti karena adanya aturan yang melarang masyarakat untuk berkumpul dan membuat keramaian.

1. Kendala Anggaran

Isu biaya dan anggaran menjadi polemik terutama saat puncak Covid 19 menyerang Indonesia. Berkurangnya kunjungan wisatawan dan alokasi dana pemerintah yang diperuntukan bagi sektor yang dirasa lebih pokok membuat anggaran pengembangan Geopark Ciletuh pun terpangkas dari 50% hingga 70%.

Setelah masa pemulihan pasca Covid 19 pun, pengelolaan Geopark Ciletuh tetaplah tidak mandiri secara finansial. Biaya pengembangan sendiri dianggarkan oleh pemerintah. Termasuk untuk pengadaan pelatihan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu untuk mendapatkan anggaran pemberdayaan, badan pengelola biasanya akan mengajukan proposal kepada dinas terkait (Bappeda, Bappenas, Kementrian) untuk pengadaan pelatihan. Proposal pelatihan yang disampaikan pun belum tentu akan disetujui. Dan jika pun disetujui, akan membutuhkan waktu higga dana dan pelatihan tersebut dapat dianggarkan.

1. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Sebagai negara taat hukum, tentu saja setiap individu maupun kelompok harus patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Pergantian pemegang kuasa dalam birokrasi pemerintahan membuat kebijakan yang ada selalu berubah-rubah mengikuti alur kepentingan pemengang kuasa saat itu. Begitupun dengan kebijakan pengembangan UGG Geopark Ciletuh – Palabuhanratu yang mana proyek pengembangannya bisa saja berubah di tengah jalan sesuai dengan arahan dan kebijakan dan dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa.

1. Mindset Masyarakat

keterlibatan dan kemauan dari masyarakat itu sendiri. Harus ada kesamaan visi dan misi dari masyarakat agar kemudian pariwisata (geowisata) di kawasan Geopark- Ciletuh ini dapat dikembangkan. Namun nyatanya masih banyak faktor-faktor penghambat dari masyarakat yang membuat proses ini tersendat dan tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Kawasan geopark yang cukup luas membuat adanya perbedaan persepsi, nilai, norma, value yang dianut oleh masyarakatnya. Selain itu penyesuaian dari sisi adat serta kebiasaan masyarakat lokal juga menjadi kerikil dalam penyatuan persepsi pariwisata. Strategi pengembangan yang di aplikasikan di desa A, bisa jadi melawan hukum adat di desa B. Begitupun sebaliknya.

Contoh lainnya, ada satu desa di Kawasan Geopark Ciletuh yang didiami oleh suku Jawa yang mana kawasan Ciltuh sendiri mayoritas dihuni oleh masyarakat bersuku Sunda. Meskipun fenomena ini dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata, namun nilai-nilai sosial dan budaya masyarakatnya tentu saja berbeda dari kebanyakan yang dianut oleh masyarakat Sunda di Ciletuh. Selain faktor internal masyarakatnya, faktor eksternal seperti tingkat pendidikan yang rendah, tingkat literasi, gagap teknologi adalah beberapa faktor yang membuat pemberdayaan masyarakat di Kawasan Geopark Ciletuh juga menjadi lambat.

Tidak mudah untuk menyamakan persepsi dan mengubah nilai-nilai yang telah dipegang secara turun-temurun ini. Oleh karena itu pendekatan yang komunikatif dan pendampingan berkelanjutan perlu dilakukan dalam memaksimalkan upaya pemberdayaan masyarakat agar tercapai pemberdayaan yang merata di seluruh Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu.

Pemberdayaan masyarakat sendiri di dalam pariwisata (geowisata) adalah salah satu bentuk dari pariwisata berbasis CBT (community-based tourism). CBT adalah suatu konsep pariwisata yang tidak hanya mengedepankan profit saja, tetapi juga memberikan manfaat dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya (Sutiarani et al., 2015). Dengan adanya pembinaan, pendampingan, pelatihan, serta edukasi yang diberikan kepada masyarakat lokal terkait pariwisata berbasis CBT, diharapkan kedepannya akan tercipta sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) dimana pariwisata tidak hanya akan berfokus kepada kepuasan serta kuantitas kunjungan wisatawan saja, tetapi juga keseimbangan antara aktivitas wisata, masyarakat dan kelestarian alam untuk jangka waktu yang panjang (Nuryantina et al., 2018). Hal ini seiring dengan tiga pilar utama pengembangan geopark yaitu konservasi, edukasi, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu konsep pariwisata dengan perlibatan masyarakat lokal di dalamnya harus terus digagas di kawasan geopark Ciletuh – Palabuhanratu. Selain memberikan daya kepada masyarakat, nantinya juga akan tercipta keseimbangan diantara tiga pilar utama pengembangan kawasan geopark yaitu konservasi, edukasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

**PENUTUP**

Kabupaten Sukabumi adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Dimana di dalamnya terdapat kawasan terpadu yang dikenal dengan UNESCO Global Geopark Ciletuh – Palabuhanratu. Dalam proses pengembangannya maka dibuatlah Masterplan Pengembangan Kawasan Geopark oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebagai bentuk pelaksanaan Perpres No. 9 tahun 2019 yang mana pada pasal 8 mengatur mengenai keterlibatan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan taman bumi (geopark). Diharapkan dengan adanya masterplan ini dapat menjadi pedoman serta tolak ukur bagi Geopark Ciletuh - Palabuhanratu khususnya dalam proses konservasi, edukasi, dan juga dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat lokal yang ada di kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhanratu.

Setelah dikeluarkannya pedoman berupa masterplan pengembangan kawasan geopark, Badan Pengelola Geopark Ciletuh – Palabuhanratu pun telah melakukan beberapa strategi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah berupa pendampinangan, pembinaan serta pelatihan soft skill dan hard skill kepada masyarakat untuk menunjang aktivitas geowisata yang terdapat di kawasan taman bumi tersebut.

Namun dalam prosesnya, secara garis besar masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan. Selain pandemi Covid 19 yang tentunya juga dirasakan oleh sektor-sektor lainnya secara global, anggaran pemerintah serta kebijakan yang terus berubah juga menjadi salah satu penghambat berjalannnya proses pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Faktor dari masyarakat selaku tonggak pemberdayaan ini sendiri pun dirasa masih sangat lemah. Kawasan Geopark Ciletuh yang cukup luas membuat adanya perbedaan nilai dan norma yang di anut antar kelompok masyarakat yang membuat tidak semua upaya pemberdayaan dapat dilaksanakan secara sama dan serupa. Harus ada penyesuaian dan pendekatan yang berbeda-beda agar pengembangan dan upaya pensejahteraan masyarakat ini dapat dilakukan.

Selain itu mutu pendidikan, literasi, kecakapan teknologi serta pola pikir dan persepsi masyarakat mengenai pariwisata yang masih rendah membuat proses pendampingan dan pelatihan harus terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan visi pengembangan yang tertuang di dalam masterpalan pengembangan kawasan geopark yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yaitu mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) di tahun 2030 dimana tercapai keseimbangan dalam implementasi visi konservasi, edukasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kawasan UGG Ciletuh – Palabuhanratu.

# DAFTAR PUSTAKA

Bongdan et al. (1992). *Pengantar Metode Kualitatif.* Surabaya: Usaha Nasional.

Darsiharjo et al. (2016). Pengembangan Geopark Ciletuh Berbasis Partisipasi Masyarakat Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Manajemen Resort dan Leisure Universitas Pendidikan Indonesia*, 59.

Komoo, I. (2010). Geopark sebagai peraga pembangunan lestari wilayah. *Akademika*, 9-18.

Komoo, Ibrahim. (2003). Conservation Geology: Protecting Hidden Treasures of Malaysia. *Academy of Sciences Inaugural Lectures*.

Komoo, Ibrahim. (2009). Memartabatkan Sumber Warisan Geologi di Malaysia. Dalam Warisan Geologi Malaysia Ke Arah Memartabatkan Sumber Geowarisan. *LESTARI*, 3-17.

Ma'arif et al. (2019). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Dusun Plempoh, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta. *Jurnal Populika*, 62.

McKeever. (2009). The UNESCO Global Network of National Geoparks: Geological Heritage and Sustainability. *LESTARI*.

Nuryantina et al. (2018). Analisis Persepsi Pengelola Dan Masyarakat Mengenai Program Community Based Tourism Di Kampung Wisata Kreatif Eco Bambu Cipaku. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation,*, 23-36.

Rachaju et al. (2022). Program Pemberdayaan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Wilayah Kabupaten Sukabumi. *International Journal of Demos*, 915-916.

Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif – Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya .* Jakarta: Grasindo.

Rahmafitria et al. (2019). Agglomeration in tourism: the case of SEZs in regional development goals. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 342-351.

Setyadi et al. (2012). Studi Komparasi Pengelolaan Geopark di Dunia untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 401.

Suharto. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.* Bandung: Refika Aditama.

Sutiarani et al. (2015). Dampak Keberadaan Dusun Bambu Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua. *Tourism Scientific Journal*, 1-17.

UNESCO. (2000). UNESCO Geoparks Programme Feasibility Study. *UNESCO*.